DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku:

Ali, Yunasril, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta : Balai Pustaka, 2007).

Amos, H.F Abraham, Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari ORLA, ORBA, Sampai Reformasi): Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).

Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007).

Asshidiqie, Jimly, Penegakan Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010).

Dyah Octhorina Susanti dan A'An Effendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Haris, Syamsuddin, Membangun Format Baru Otonomi Daerah, (Jakarta : LIPI Press, 2006).

_____, Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007).

Ida, Laode, Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal dan Clean Government, (Jakarta : PSPK, 2000).

Juwaini, Jazuli, Otonomi Sepenuh Hati, (Jakarta : Al-I'Tishom Cahaya Umat, 2007).

Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).

Nawawi, Juanda, Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik, (Makassar : CV Menara Intan, 2012).

Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : Grasindo, 2007).

Saleh, Hendarin Ono, Desentralisasi Dari Penjajahan Hingga Reformasi (Analisa Historis Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia), (Jakarta : ILGOS, 2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Sukriono, Didik, Hukum, Konstitusi Dan Konsep Otonomi (Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi), (Malang : Setara Press, 2013).

Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

Sunindhia, Y.W, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1996).

Redaksi Great Publisher, Buku Pintar Politik, Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta : Jogja Great Publisher, 2009).

Widjaja, H.A.W, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009).

b. Jurnal-Jurnal

Asyari, Fatimah, Jurnal LEGALITAS Volume 2 Nomor 1, 2017.

Hidayat, Syarif, Jurnal POLITIK Volume 1 Nomor 1, 2008.

Irwan, Lukman, Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance di Indonesia (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1), (Universitas Hasanuddin, 2008).

Nugraha, Sari, Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintah Pusat (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 Nomor 1), 2004.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

d. Sumber Lain

Bangkit Angga Barokah, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Wawancara, (Purwokerto : 10 Januari 2018).